



The Asia Foundation



Restorasi Hutan Aceh



Tutupan hutan Aceh | Foto : Rhett Butler

Menghijaukan dan Melindungi Hutan Aceh

“Kabupaten memberi dukungan kuat pada penghijauan wilayah hutan yang dilindungi. Inilah yang diharapkan untuk mencegah bencana ekologis di Tamiang,” Razuardi Ibrahim, sekretaris Bupati Tamiang Aceh.

Program SETAPAK mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan sebagai dasar untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Aksi langsung masyarakat sipil sangat penting bagi tata kelola hutan dan lahan yang baik. Selain itu juga sangat penting untuk meningkatkan kepedulian publik dan meningkatkan pentingnya aturan hukum di semua tingkatan pemerintahan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Mitra SETAPAK di Aceh telah secara aktif merestorasi wilayah hutan yang dirusak oleh perkebunan kelapa sawit dan mendesak pemerintahan lokal, regional dan nasional untuk menghentikan rencana eksploitasi Ekosistem Leuser yang dilindungi, yakni salah satu wilayah yang paling beragam kehidupan flora dan faunanya di muka bumi. Aktivitas ini memperlihatkan betapa pentingnya aksi masyarakat yang kuat dan terkoordinasi dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah.



Memangkas kelapa sawit untuk memulihkan hutan | Foto: Greeners

Pada tanggal 29 September 2014, suara gergaji mesin bergemuruh di dekat Tenggulun, sebuah desa di Kabupaten Tamiang, perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Kali ini suara mesin tersebut merupakan pertanda baik bagi hutan Tamiang, yang merupakan bagian dari Ekosistem Lueser. Suara mesin ini menandai awal proyek pembersihan 1.071 hektar lahan perkebunan kelapa sawit ilegal di hutan lindung dan menghijaukan kembali wilayah hutan lindung tersebut. Anggota komunitas lokal bergabung pada acara ini saat kepala KPH Wilayah III memotong pohon kelapa sawit, dan menanam satu bibit pohon lokal sebagai gantinya. Sejak awal acara ini, seluas enam hektar lahan yang terbentang sepanjang sepuluh kilometer telah dibersihkan, yang ditandai dan lahannya ditanami kembali dengan tanaman hutan.

HAKA (Hutan Alam dan Lingkungan Aceh), salah satu mitra SETAPAK, bekerja mengadvokasi dan memulihkan kawasan hutan dalam Ekosistem Leuser, di mana pimpinan daerah sebelumnya telah menerbitkan izin ilegal untuk perkebunan kelapa sawit, yang melanggar status lindung kawasan hutan tersebut. Tezar Pahlevie, manajer wilayah HAKA, mengatakan, “Upaya-upaya seperti restorasi ini dan aksi masyarakat yang lebih luas dibutuhkan untuk menyelamatkan rakyat Aceh Tamiang dari bencana ekologis.” Proyek ini membuat pemerintah Aceh, Dinas Kehutanan provinsi Aceh dan KPH Wilayah III, Forum Konservasi Leuser (FKL), LSM-LSM lokal lain, serta komunitas lokal dan polisi bergabung bersama untuk menyelamatkan Leuser.

Untuk mengedukasi komunitas lokal mengenai akibat ekologis kelapa sawit yang merusak di hutan lindung serta meningkatkan kesadaran terhadap nilai hutan Tamiang, maka para staf dan sukarelawan HAKA menyelenggarakan berbagai pertemuan, lokakarya yang mendidik, dan melakukan advokasi dari pintu ke pintu. Hasilnya, tuntutan komunitas untuk merestorasi hutan Tamiang semakin bertambah banyak. Dengan dukungan komunitas, HAKA menyelenggarakan serangkaian pertemuan dengan para pejabat pemerintah lokal dan bupati untuk mendiskusikan keuntungan ekologis dan sosial dari pemulihan hutan lindung, dan pekerjaan ini mensyaratkan rehabilitasi hutan. Setelah pertemuan-pertemuan itu, Bupati mendukung, dan pada tanggal 6 November 2014, Bupati mengeluarkan keputusan untuk melegalisasi ditutupnya perkebunan sawit dan restorasi 1.071 hutan dan mangrove di Aceh Tamiang.

Sejak tahun 2000, di kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, hutan-hutan lindung ditebangi dan ditanami kelapa sawit pada lahan seluas lebih dari 4.000 hektar secara ilegal. “Lebih dari 10.000 hektar hutan di dataran tinggi telah rusak parah,” kata Rudi Putra, staf HAKA yang diberi penghargaan bergengsi Goldman Prize pada tahun 2014. Pembabatan lahan ini telah merusak hutan-hutan yang ada. Dalam proses investigasi, HAKA mengidentifikasi dua puluh enam perusahaan memiliki perkebunan ilegal di hutan Tamiang. Hasil penyelidikan ini kemudian dilaporkan kepada penegak hukum berwenang, yang kemudian menuntut satu perusahaan atas pembabatan lahan ilegal dan satu orang dipenjara selama enam bulan serta denda sebesar Rp 10 juta, ditambah satu orang lagi dijadikan sebagai tersangka.

Memulihkan Layanan Ekosistem Yang Penting

Hutan Aceh Tamiang adalah bagian dari Ekosistem Leuser, hutan terkenal di dunia yang membentang seluas 2,6 juta hektar yang termasuk dalam daftar *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), sebagai salah satu “Tempat yang Paling Tak Tergantikan di Dunia.”

Kawasan ini meliputi dua gunung, tiga danau dan lebih dari sembilan sistem sungai, sehingga merupakan hutan dengan area terluas yang masih tersisa di Asia dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan terkenal dunia. Ekosistem ini merupakan lokasi terakhir di muka bumi di mana gajah-gajah Sumatera, orang utan, badak, dan harimau langka yang terancam punah masih hidup di alam liar. Pembabatan lahan hutan Tamiang telah membelah koridor kehidupan alam liar – koridor penting bagi spesies-spesies yang terancam punah ini untuk berhubungan dengan populasi lainnya.

Hutan Tamiang juga berfungsi sebagai penyimpanan air yang menyerap curah hujan dengan baik untuk mencegah banjir. Konversi hutan telah menyebabkan bencana seperti banjir bandang dan longsor yang semakin parah di Aceh, yang mengakibatkan banyak korban jiwa setiap tahunnya, dan merusak produksi pertanian. Pembabatan hutan dalam skala besar, yang menurut perhitungan HAKA melebihi 80.000 hektar, telah merusak parah kemampuan hutan untuk menahan banjir. Pada tahun 2006, banjir besar dan longsor telah melanda Aceh Tamiang. “Berdasarkan data Bank Dunia, banjir di tahun 2006 menelan biaya sebesar Rp 1 triliun (US\$77 juta). Banjir tersebut disebabkan oleh penyusutan signifikan tutupan hutan pada kawasan serapan air Tamiang,” kata Rudi.

Meskipun Ekosistem Leuser dirancang sebagai Kawasan Strategis Nasional, dimana secara hukum seharusnya dilarang melakukan praktek tata guna tanah yang merusak lingkungan, namun konservasi tetap menghadapi tantangan yang besar. Sebagian besar kawasan ini memang dilindungi, namun perusahaan-perusahaan

perkebunan, dan perusahaan konsesi kayu tetap ada di dalamnya, atau berdampingan dengannya. Aceh telah kehilangan lebih dari sepertiga tutupan hutannya selama 20 tahun terakhir, dan selama 2005 hingga 2009, 36.000 hektar hutan telah dirusak.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penyebab hilangnya hutan di Indonesia. Perkebunan-perkebunan baru seringkali dibuka dengan membat habis hutan dan lahan gambut karena biayanya lebih mahal untuk merehabilitasi lahan yang sudah digunakan daripada untuk membat lahan baru. Perusahaan perkebunan sering membiayai operasinya dengan menebangi hutan dan menjual kayu atau bubur kayunya, dan di banyak kasus tidak melakukan hal lain kecuali membat lahan.

Permintaan global CPO yang meluas telah mendorong perkebunan masuk ke dalam hutan tropis di mana-mana, termasuk di Ekosistem Leuser. Selain memberi akibat yang signifikan pada tutupan hutan, keanekaragaman hayati, emisi karbon dan penyimpanan karbon, gangguan-gangguan ini – termasuk penebangan, pembakaran, dan pembangunan jalan yang berkaitan dengan operasinya – menyebabkan perkebunan sawit juga telah membagi-bagi wilayah hutan, merusak habitat satwa, menghalangi migrasi satwa dan memperbanyak perambahan hutan. Perkebunan juga mencemari tanah dan air dengan pestisida, menarik hama seperti tikus, dan menyebabkan erosi tanah serta menambah sedimentasi di sungai, dan pabrik kelapa sawit juga sering membuang bahan-bahan yang tidak diolah terlebih dahulu ke dalam aliran air. Pemberhentian ekspansi perusahaan kelapa sawit sangat penting untuk mengurangi emisi karbon dioksida Indonesia, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi korban jiwa manusia dan kerugian ekonomi pada komunitas-komunitas lokal.

Bisnis Licin

Kelapa sawit merupakan minyak yang dapat dikonsumsi yang diambil dari buah pohon kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). Minyak ini digunakan di seluruh dunia dalam jumlah banyak untuk produk-produk makanan pabrik seperti margarin, sop, saus, es krim, biskuit, mi instan dan produk-produk pangan lainnya. Minyak ini adalah yang paling murah dan paling banyak digunakan di dunia, terhitung 65 persen dari minyak ini diperdagangkan secara internasional. Minyak ini juga mulai banyak digunakan dalam bahan bakar bio-diesel, serta dalam pembuatan pelumas, deterjen, sabun dan kosmetik.

Kelapa sawit adalah minyak goreng yang populer diantara para produsen karena hasil panennya tinggi, tidak membutuhkan sebanyak lahan dibandingkan dengan minyak goreng lain. Kelapa sawit disukai oleh industri makanan karena murah dan semi padat di suhu ruang. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia (23,6 juta ton di tahun 2011) yang memenuhi sekitar separuh produksi global. Hasil ini diharapkan berlipat ganda di tahun 2030. Minyak sawit saat ini menyumbang sekitar 4,5 persen PDB Indonesia, dan Sumatera memiliki sekitar 67 persen dari kawasan kelapa sawit (9,2 juta hektar), dan menyumbang 74 persen produksi nasional.



Pemusnahan kebun sawit ilegal telah mencapai 200 hektar dari target tahap pertama seluas 1.071 hektar | Foto: Junaidi Hanafiah

Membiayai Penghutan Kembali

Langkah selanjutnya dalam mengembalikan hutan Tamiang setelah membatat bersih kelapa sawit adalah menanam kembali pepohonan lokal. Beragam donor, termasuk Forum Konservasi Lingkungan (FKL), telah menyumbang Rp 600 juta (sekitar US\$ 50.000) untuk kerja penghutan kembali. Namun menurut Kepala Kehutanan dan Perkebunan Tamiang, dibutuhkan Rp 3 miliar (sekitar US\$ 240.000) lagi untuk kerja ini. Untuk mendukung permohonan alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten dan nasional bagi restorasi, HAKA bekerja sama dengan pemerintah lokal dengan meminta pemerintah pusat mendanainya dan melakukan kajian anggaran yang didukung oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). Kajian ini akan menentukan seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk restorasi dan badan pemerintah mana saja yang harus bertanggung jawab.

Untuk melindungi tutupan hutan yang tersisa di masa depan, koalisi sepuluh LSM, yang dinamai Koalisi Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Aceh mengadvokasi moratorium penggunaan tanah untuk industri perkebunan kelapa sawit di -kabupaten Tamiang. Menurut penelitian HAKA, hanya 20 persen atau 46.100 hektar tutupan hutan alam yang masih tersisa di Aceh Tamiang. Lahan-lahan di beberapa kecamatan yang tersisa telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet, konsesi pertambangan dan pemukiman manusia. Koalisi Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Aceh telah memproduksi sebuah *policy paper* dan mempresentasikannya pada Bupati dalam sebuah pertemuan untuk mempromosikan manfaat melindungi hutan daripada mengkonversinya menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan. Perlindungan hutan Tamiang yang tersisa sangat penting untuk melindungi sumber air untuk komunitas lokal Aceh Tamiang dan untuk menjaga Ekosistem Leuser dan fungsi mitigasi perubahan iklim.

Program SETAPAK The Asia Foundation, yang didanai oleh UK Climate Change Unit, fokus pada perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mitigasi perubahan iklim global, program ini membantu desentralisasi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan dan distribusi manfaat sumber daya alam yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.